

Danantara

DAN

ARAH BARU

KAPITALISME NEGARA

DI INDONESIA

By: Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: Danantara dan Arah Baru Kapitalisme Negara
di Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

22 Juni 2026

DANANTARA DAN ARAH BARU KAPITALISME NEGARA DI INDONESIA

Abstrak

Danantara atau **Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara** merupakan salah satu institusi ekonomi-politik paling penting dalam lanskap pembangunan Indonesia mutakhir. Kehadirannya menandai pergeseran dari model pengelolaan BUMN yang tersebar menuju model konsolidasi aset negara, investasi strategis, dan pembentukan super-holding yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional. Secara hukum, Danantara dibentuk melalui kerangka perubahan Undang-Undang BUMN dan diatur lebih lanjut melalui PP No. 10 Tahun 2025, yang kemudian diubah oleh PP No. 19 Tahun 2026 untuk menyesuaikan kewenangan, tata kelola, dan akuntabilitas lembaga tersebut. Situs resmi Danantara menyatakan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai badan pengelola investasi strategis yang mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset BUMN untuk mendukung industrialisasi, transformasi ekonomi, dan daya saing nasional. ([Danantara Indonesia](#))

Artikel ini membahas Danantara sebagai gejala **kapitalisme negara baru** di Indonesia, yaitu suatu model di mana negara tidak sekadar menjadi regulator, tetapi juga pemilik, investor, pengarah industrialisasi, dan pengelola portofolio strategis. Dengan aset yang dilaporkan dapat mencapai sekitar USD 900 miliar serta rencana awal investasi USD 20 miliar pada sektor-sektor seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, kecerdasan buatan, kilang minyak, dan produksi pangan, Danantara tidak hanya menjadi institusi keuangan, melainkan simpul baru relasi antara negara,

pasar, BUMN, investor global, dan agenda pembangunan nasional.

([Reuters](#))

Namun, besarnya mandat Danantara juga menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana menjaga keseimbangan antara orientasi komersial dan mandat pembangunan? Bagaimana memastikan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pemisahan yang jelas antara keputusan investasi dan kepentingan politik jangka pendek? OECD menekankan bahwa penguatan tata kelola entitas kepemilikan negara dan keberlanjutan BUMN menjadi prasyarat penting agar reformasi BUMN mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang kredibel. ([OECD](#)) Artikel ini menyimpulkan bahwa Danantara dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi Indonesia bila dibangun di atas tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin, pengawasan publik yang efektif, dan orientasi nilai jangka panjang. Sebaliknya, tanpa disiplin kelembagaan, Danantara berisiko menjadi perluasan kapitalisme negara yang terlalu terpolitisasi, menimbulkan risiko fiskal terselubung, distorsi pasar, dan melemahkan kepercayaan investor.

Kata kunci: *Danantara, kapitalisme negara, BUMN, sovereign wealth fund, super-holding, investasi strategis, tata kelola, hilirisasi, ekonomi politik Indonesia, Prabowo Subianto.*

1. Pendahuluan

Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanan ekonomi politiknya. Setelah dua dekade lebih reformasi yang banyak menekankan liberalisasi, desentralisasi, privatisasi terbatas, dan penguatan mekanisme pasar, kini muncul kembali kecenderungan kuat ke arah negara yang lebih aktif, lebih intervensionis, dan lebih strategis. Negara tidak lagi cukup puas menjadi pembuat aturan, pemberi izin, atau penjaga stabilitas makroekonomi.

Negara juga ingin hadir sebagai pemilik aset, pengarah investasi, akselerator industrialisasi, dan bahkan sebagai aktor pasar yang mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional.

Dalam konteks inilah Danantara harus dibaca. Danantara bukan sekadar lembaga baru dalam arsitektur BUMN. Ia adalah simbol perubahan cara negara Indonesia memahami peran dirinya dalam ekonomi. Melalui Danantara, negara berupaya mengubah BUMN dari sekadar perusahaan milik negara yang berjalan dalam sektor masing-masing menjadi portofolio strategis nasional yang dikelola secara terintegrasi. Dengan kata lain, Danantara mengubah BUMN dari kumpulan entitas sektoral menjadi instrumen kapital nasional.

Secara resmi, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi strategis yang berada di bawah Presiden, dengan mandat mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset BUMN. Situs resmi Danantara menyatakan bahwa lembaga ini bertujuan memperkuat tata kelola aset negara, menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. ([Danantara Indonesia](#)) Dalam kerangka hukum, PP No. 10 Tahun 2025 menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, dengan organ yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Kehadiran Danantara menjadi penting karena Indonesia sedang menghadapi beberapa tekanan sekaligus. Pertama, tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5% menuju target yang lebih ambisius. Kedua, kebutuhan memperkuat hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak terus-menerus terperangkap sebagai eksportir bahan mentah. Ketiga, kebutuhan memperbaiki kinerja BUMN, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai agen pembangunan. Keempat, kebutuhan memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal negara. IMF mencatat bahwa pemerintah Indonesia melihat

Danantara dan sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan jangka menengah menuju 8% pada 2029.

([IMF eLibrary](#))

Namun, besarnya mandat Danantara membawa dilema. Di satu sisi, konsolidasi aset negara dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat daya tawar investasi, dan mempercepat pembangunan sektor strategis. Di sisi lain, konsentrasi kekuasaan ekonomi dalam satu badan dapat menimbulkan risiko tata kelola, konflik kepentingan, politisasi investasi, dan beban fiskal terselubung. Reuters pada Juni 2026 melaporkan bahwa perluasan mandat Danantara, termasuk keterlibatannya dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis dan berbagai proyek prioritas, memunculkan pertanyaan tentang kapasitas eksekusi dan independensi politik lembaga tersebut. ([Reuters](#))

Dengan demikian, pertanyaan utama artikel ini adalah: **apakah Danantara merupakan instrumen modernisasi kapitalisme negara yang produktif, ataukah ia berpotensi menjadi bentuk baru konsentrasi kekuasaan ekonomi negara yang rawan distorsi?** Jawabannya tidak dapat diberikan secara hitam-putih. Danantara adalah peluang sekaligus risiko. Ia dapat menjadi "kendaraan transformasi" bila tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan disiplin investasi dijaga. Namun, ia juga dapat menjadi sumber kerentanan bila mandatnya terlalu luas, kabur, dan tunduk pada tekanan politik jangka pendek.

2. Konsep Kapitalisme Negara

Kapitalisme negara adalah sistem ekonomi di mana negara memainkan peran besar dalam kepemilikan, pembiayaan, pengendalian, dan pengarahan aktivitas ekonomi. Berbeda dari sosialisme klasik, kapitalisme negara tidak menghapus pasar. Pasar tetap ada, perusahaan tetap mencari laba, investasi tetap dihitung berdasarkan risiko dan imbal hasil, dan

persaingan tetap berlangsung. Namun, dalam kapitalisme negara, negara tidak hanya menjadi wasit. Negara juga menjadi pemain utama.

Dalam literatur modern, kapitalisme negara tidak selalu dipahami sebagai kebalikan dari kapitalisme pasar. Ia lebih tepat dipahami sebagai spektrum. Pada satu ujung, terdapat ekonomi pasar liberal, di mana peran negara relatif terbatas pada regulasi, perlindungan hak milik, stabilitas makroekonomi, dan penyediaan barang publik. Pada ujung lain, terdapat ekonomi yang sangat dikendalikan negara, di mana perusahaan, bank, investasi, dan alokasi sumber daya sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Di antara dua kutub itu terdapat berbagai bentuk campuran: BUMN strategis, bank pembangunan, dana kekayaan negara, subsidi industri, kebijakan hilirisasi, proteksi selektif, kemitraan publik-swasta, dan holding investasi negara.

Musacchio, Lazzarini, dan Aguilera (2015) menyebut munculnya “varietas baru kapitalisme negara” yang lebih canggih dibanding nasionalisasi lama. Negara modern tidak selalu mengelola langsung semua perusahaan; ia dapat mengontrol melalui kepemilikan saham minoritas, bank pembangunan, sovereign wealth fund, holding company, regulasi selektif, atau jaringan insentif industri. Dalam model ini, negara tidak sekadar memiliki perusahaan, tetapi membentuk arah strategis sektor-sektor tertentu.

Danantara masuk dalam logika ini. Ia bukan kementerian biasa. Ia juga bukan BUMN tunggal. Ia adalah badan investasi dan pengelolaan aset yang menggabungkan fungsi super-holding, sovereign investment vehicle, dan instrumen pembangunan. Karena itu, Danantara dapat disebut sebagai salah satu bentuk paling eksplisit dari kapitalisme negara baru Indonesia.

Kapitalisme negara memiliki beberapa rasionalitas. Pertama, negara dapat memperbaiki kegagalan pasar, terutama dalam sektor yang membutuhkan investasi besar, jangka panjang, dan berisiko tinggi. Kedua, negara dapat mempercepat industrialisasi, terutama bila sektor swasta belum cukup kuat. Ketiga, negara dapat menjaga kedaulatan ekonomi dalam sektor strategis

seperti energi, pangan, keuangan, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya alam. Keempat, negara dapat menggunakan aset publik untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Namun kapitalisme negara juga memiliki bahaya. Ketika keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kelayakan ekonomi, maka modal publik dapat disalurkan ke proyek yang tidak efisien. Ketika BUMN digunakan sebagai alat populisme fiskal, maka neraca perusahaan dapat rusak. Ketika pengawasan lemah, maka risiko korupsi, rente, patronase, dan moral hazard meningkat. Dengan demikian, kapitalisme negara hanya dapat berhasil bila disertai tata kelola yang kuat.

3. Danantara dalam Arsitektur Baru Ekonomi Politik Indonesia

Danantara lahir dalam konteks Indonesia yang sedang mencari jalan untuk naik kelas. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan relatif stabil, tetapi belum cukup cepat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Pertumbuhan sekitar 5% memberikan stabilitas, tetapi belum cukup untuk menciptakan lompatan produktivitas, memperluas kelas menengah yang kuat, dan mengatasi ketimpangan struktural.

IMF mencatat bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan, tetapi peningkatan pertumbuhan jangka panjang membutuhkan investasi publik berkualitas, peningkatan kontribusi sektor swasta, reformasi iklim usaha, pembangunan modal manusia, infrastruktur, keterbukaan perdagangan, dan tata kelola. ([IMF eLibrary](#)) OECD pada Juni 2026 memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan tekanan dari harga energi, ketidakpastian kebijakan, serta melemahnya momentum konsumsi dan investasi. ([OECD](#)) Dalam konteks ini, Danantara diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat investasi di luar pola belanja negara konvensional.

Secara kelembagaan, Danantara menarik karena ia menggeser pusat gravitasi pengelolaan BUMN. Sebelumnya, BUMN dikelola melalui kementerian teknis dan Kementerian BUMN dengan pola sektoral. Dalam pola baru, aset BUMN dapat dikonsolidasikan dalam satu badan yang memiliki orientasi portofolio. Artinya, BUMN tidak lagi hanya dilihat sebagai perusahaan individual, melainkan sebagai kumpulan aset strategis nasional yang harus dikelola untuk menghasilkan nilai, dividen, sinergi, dan kemampuan investasi.

Dalam teori korporasi modern, pendekatan portofolio dapat memberikan manfaat. Aset yang kurang produktif dapat direstrukturisasi. Dividen dari sektor matang dapat dialihkan untuk membiayai sektor masa depan. Sinergi antar-BUMN dapat diperkuat. Duplikasi investasi dapat dikurangi. Pembiayaan proyek strategis dapat dirancang lebih profesional. Namun, pendekatan portofolio juga membutuhkan kapasitas manajemen yang tinggi. Bila konsolidasi hanya administratif, tanpa disiplin investasi, maka holding besar dapat berubah menjadi birokrasi besar.

Danantara juga menjadi arena baru hubungan antara negara dan pasar global. Reuters melaporkan bahwa Danantara dirancang untuk mengelola aset sekitar USD 900 miliar dan berencana menginvestasikan USD 20 miliar pada lebih dari 20 proyek, termasuk pengolahan nikel, bauksit, tembaga, kecerdasan buatan, kilang minyak, energi terbarukan, dan produksi pangan. ([Reuters](#)) Sektor-sektor ini menunjukkan bahwa Danantara bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga instrumen strategi industri.

Di sinilah terlihat arah baru kapitalisme negara Indonesia. Negara ingin menggunakan BUMN, aset publik, dividen, pembiayaan pasar, dan kemitraan global untuk membentuk struktur produksi masa depan. Hilirisasi mineral, energi terbarukan, pangan, AI, dan infrastruktur bukan diperlakukan sebagai sektor yang sepenuhnya diserahkan pada pasar, tetapi sebagai arena strategis yang perlu diarahkan oleh negara. Ini adalah bentuk developmental state yang diperbarui dengan instrumen keuangan modern.

4. Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund, Super-Holding, dan Development Vehicle

Danantara sering dibandingkan dengan sovereign wealth fund. Namun, secara konseptual, ia memiliki karakter yang lebih kompleks. Sovereign wealth fund tradisional biasanya dibentuk untuk mengelola surplus negara, terutama dari ekspor komoditas, cadangan devisa, atau pendapatan fiskal berlebih. Contohnya adalah dana minyak Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait Investment Authority, atau GIC Singapura. Dana-dana seperti ini sering berorientasi pada investasi jangka panjang, diversifikasi aset, stabilisasi fiskal, atau tabungan antargenerasi.

Danantara berbeda karena Indonesia bukan negara dengan surplus fiskal besar yang menganggur. Indonesia masih membutuhkan pembiayaan pembangunan, masih memiliki defisit fiskal, dan masih menghadapi kebutuhan besar dalam infrastruktur, energi, pangan, pendidikan, kesehatan, dan transformasi industri. Karena itu, Danantara lebih dekat dengan gabungan antara sovereign wealth fund, holding BUMN, development fund, dan investment management agency.

IMF menggambarkan Danantara sebagai super-holding baru yang dibentuk pada Februari 2025 untuk mengonsolidasikan dan mengelola BUMN, termasuk bank-bank publik, serta mendorong investasi strategis nasional. IMF juga mencatat bahwa Danantara memiliki tujuan manajemen aset, investasi dalam prioritas nasional, serta pembiayaan melalui berbagai instrumen termasuk dividen BUMN, aset BUMN, utang dengan atau tanpa jaminan, dan model co-investment. ([IMF eLibrary](#))

Inilah sumber kekuatan sekaligus sumber risiko Danantara. Sebagai sovereign investment vehicle, ia dapat menarik investor global. Sebagai super-holding, ia dapat meningkatkan efisiensi BUMN. Sebagai development vehicle, ia dapat mendukung proyek yang memiliki manfaat sosial tinggi. Tetapi bila ketiga fungsi ini tidak dipisahkan dengan jelas,

maka muncul kebingungan mandat. Proyek komersial, proyek strategis, dan proyek pelayanan publik dapat tercampur dalam satu neraca. Akibatnya, sulit menilai kinerja lembaga secara objektif.

Misalnya, bila Danantara membiayai proyek energi terbarukan dengan imbal hasil rendah tetapi manfaat sosial tinggi, apakah proyek itu harus dinilai sebagai investasi bisnis atau kebijakan publik? Bila Danantara diminta membantu program pangan, apakah kerugiannya dianggap kegagalan manajemen atau subsidi sosial? Bila Danantara menggunakan dividen BUMN untuk membiayai proyek pemerintah, apakah itu investasi produktif atau belanja fiskal yang dipindahkan ke luar APBN?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kapitalisme negara sering menciptakan wilayah abu-abu antara bisnis dan politik. Dalam wilayah abu-abu itu, akuntabilitas dapat melemah. Oleh sebab itu, Danantara membutuhkan klasifikasi portofolio yang jelas: portofolio komersial, portofolio strategis, portofolio pembangunan, dan portofolio pelayanan publik. Masing-masing harus memiliki indikator kinerja, standar risiko, skema pembiayaan, dan mekanisme pelaporan yang berbeda.

5. Peluang Strategis Danantara

Danantara memiliki beberapa peluang strategis yang tidak dapat diabaikan.

Pertama, Danantara dapat memperkuat **konsolidasi aset negara**. Indonesia memiliki banyak BUMN dengan aset besar, tetapi tidak semuanya efisien, produktif, atau terintegrasi. Sebagian BUMN memiliki aset kuat tetapi tata kelola lemah. Sebagian memiliki mandat publik tetapi neraca keuangan terbatas. Sebagian lain memiliki potensi ekspansi global tetapi belum memiliki dukungan modal dan strategi yang memadai. Dengan pendekatan holding investasi, Danantara dapat menilai seluruh aset BUMN sebagai portofolio nasional.

Kedua, Danantara dapat mempercepat **hilirisasi industri**. Indonesia memiliki posisi penting dalam komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, sawit, batu bara, gas, dan sumber daya laut. Selama ini, nilai tambah sering hilang karena Indonesia mengekspor bahan mentah atau produk setengah jadi. Dengan Danantara, negara dapat mengarahkan investasi ke rantai nilai yang lebih tinggi: smelter, baterai, kendaraan listrik, petrokimia, energi baru, pangan olahan, dan industri berbasis teknologi.

Ketiga, Danantara dapat memperkuat **kedaulatan ekonomi**. Dalam dunia yang semakin multipolar, negara-negara besar menggunakan kebijakan industri, subsidi, pembatasan ekspor, kontrol teknologi, dan instrumen keuangan negara untuk memperkuat posisi nasional. Indonesia tidak dapat lagi hanya mengandalkan pasar global yang dianggap netral. Danantara dapat menjadi instrumen untuk menjaga sektor strategis tetap berada dalam kendali nasional, sambil tetap membuka ruang bagi investasi global.

Keempat, Danantara dapat memperbaiki **pembiayaan pembangunan**. APBN memiliki keterbatasan. Defisit fiskal, subsidi energi, belanja sosial, dan kebutuhan infrastruktur membuat ruang fiskal tidak selalu cukup. OECD mencatat bahwa defisit anggaran Indonesia diperkirakan melebar pada 2026 dan belanja melalui Danantara dapat mendukung investasi di luar belanja modal langsung negara. ([OECD](#)) Bila dikelola hati-hati, pembiayaan melalui Danantara dapat memperluas kapasitas investasi nasional tanpa seluruhnya membebani APBN.

Kelima, Danantara dapat meningkatkan **profesionalisasi BUMN**. Jika Danantara benar-benar menerapkan standar investasi, audit, pengukuran kinerja, dan tata kelola internasional, maka BUMN dapat dipaksa menjadi lebih efisien. BUMN yang selama ini terlalu nyaman dengan perlindungan negara dapat diarahkan menjadi perusahaan yang kompetitif. BUMN yang memiliki potensi global dapat didorong untuk ekspansi. BUMN yang tidak produktif dapat direstrukturasikan.

Keenam, Danantara dapat menjadi instrumen **transformasi teknologi**. Rencana investasi pada AI dan digitalisasi menunjukkan bahwa negara

menyadari pentingnya ekonomi masa depan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi asing. Melalui Danantara, negara dapat berinvestasi dalam data center, infrastruktur digital, AI terapan, teknologi kesehatan, energi cerdas, dan ekosistem inovasi. Namun, sektor ini membutuhkan kompetensi teknis tinggi dan tata kelola risiko yang berbeda dari proyek infrastruktur fisik biasa.

6. Risiko Ekonomi Politik Danantara

Peluang besar selalu disertai risiko besar. Danantara memiliki setidaknya enam risiko utama.

6.1 Risiko Politisasi Investasi

Risiko pertama adalah politisasi. Ketika Danantara berada langsung di bawah Presiden dan memiliki mandat sangat luas, keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh prioritas politik. Prioritas politik tidak selalu buruk. Negara memang harus menentukan arah pembangunan. Namun, masalah muncul bila proyek dipilih bukan karena kelayakan ekonomi dan manfaat sosial yang terukur, melainkan karena kepentingan elektoral, patronase, atau tekanan kelompok tertentu.

Reuters pada Juni 2026 melaporkan bahwa mandat Danantara berkembang cepat, termasuk keterlibatan dalam ekspor komoditas strategis, proyek pertanian, program makan sekolah, dan pembangunan hotel untuk jamaah haji. Laporan yang sama menyebutkan kekhawatiran analis bahwa mandat yang terlalu luas dapat menguji kapasitas dan independensi politik Danantara. ([Reuters](#)) Ini menunjukkan bahwa isu utama bukan hanya apakah Danantara besar, tetapi apakah mandatnya cukup jelas.

6.2 Risiko Mandat yang Terlalu Luas

Danantara dapat menjadi terlalu banyak hal sekaligus: investor komersial, holding BUMN, bank pembangunan, pelaksana proyek strategis, stabilisator pasar, pengelola ekspor, dan instrumen kebijakan sosial.

Mandat yang terlalu luas membuat akuntabilitas kabur. Bila semua hal menjadi tugas Danantara, maka tidak ada satu pun ukuran kinerja yang benar-benar tajam.

Dalam teori organisasi, mandat yang kabur menciptakan goal ambiguity. Goal ambiguity menyebabkan sulitnya evaluasi. Bila target Danantara adalah laba, maka proyek sosial dapat dianggap mengganggu. Bila targetnya pembangunan, maka kerugian finansial dapat dibenarkan. Bila targetnya stabilitas politik, maka investasi dapat berubah menjadi instrumen populisme. Karena itu, Danantara perlu membangun peta mandat yang tegas.

6.3 Risiko Fiskal Terselubung

Danantara dapat memperluas pembiayaan pembangunan di luar APBN. Ini bisa berguna, tetapi juga berbahaya. Bila Danantara meminjam, menjaminkan aset, atau menggunakan dividen BUMN untuk proyek strategis, maka risiko fiskal dapat berpindah dari APBN ke neraca BUMN atau badan investasi. Secara formal, defisit APBN mungkin tetap terkendali, tetapi secara ekonomi, kewajiban negara tetap meningkat.

IMF menekankan pentingnya menjaga ruang kebijakan dan kredibilitas fiskal, termasuk membatasi aktivitas quasi-fiscal. ([IMF eLibrary](#)) Aktivitas quasi-fiscal adalah kegiatan yang memiliki dampak seperti belanja atau subsidi negara, tetapi dilakukan melalui entitas di luar APBN. Jika tidak transparan, aktivitas ini dapat menyembunyikan risiko utang, kewajiban kontinjensi, dan tekanan terhadap BUMN.

6.4 Risiko Tata Kelola dan Transparansi

Sovereign wealth fund dan holding negara membutuhkan transparansi tinggi. International Forum of Sovereign Wealth Funds menekankan bahwa Santiago Principles dirancang untuk mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan praktik investasi yang hati-hati. ([IFSWF](#)) Prinsip ini penting karena dana negara mengelola kekayaan publik. Publik

berhak mengetahui bagaimana aset negara digunakan, apa risiko yang diambil, dan siapa yang bertanggung jawab.

Reuters melaporkan pada 19 Juni 2026 bahwa Danantara belum menerbitkan laporan keuangan menjelang tenggat akhir Juni, sementara pejabat menyatakan konsolidasi laporan unit-unit membutuhkan waktu. ([Reuters](#)) Laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan. Tanpa laporan yang jelas, publik dan investor sulit menilai apakah Danantara menciptakan nilai atau hanya memindahkan risiko.

6.5 Risiko Distorsi Pasar

Ketika negara memiliki badan investasi besar, pasar dapat berubah. Perusahaan swasta mungkin merasa bersaing dengan entitas yang memiliki dukungan negara. Investor mungkin menilai bahwa akses ke proyek strategis bergantung pada kedekatan dengan lembaga negara. Bank mungkin memberi pembiayaan bukan karena kelayakan proyek, tetapi karena persepsi jaminan negara. Semua ini dapat menciptakan distorsi.

Danantara harus menghindari crowding out, yaitu keadaan ketika investasi negara justru menggantikan investasi swasta. Idealnya, Danantara melakukan crowding in: menarik modal swasta, mengurangi risiko awal, membangun pasar, dan membuka sektor yang sebelumnya tidak menarik bagi investor. Perbedaan antara crowding out dan crowding in sangat ditentukan oleh desain insentif, transparansi tender, dan disiplin investasi.

6.6 Risiko Kapasitas Eksekusi

Mengelola aset ratusan miliar dolar, ribuan perusahaan, dan proyek strategis lintas sektor membutuhkan kapasitas luar biasa. Ini bukan hanya persoalan modal. Ini persoalan sumber daya manusia, sistem informasi, manajemen risiko, audit internal, pengendalian kepatuhan, keahlian sektor, diplomasi investasi, dan integritas kelembagaan.

Reuters melaporkan bahwa mandat Danantara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui unit baru Danantara Sumberdaya Indonesia menimbulkan pertanyaan kapasitas, termasuk kebutuhan investasi dan infrastruktur yang besar. ([Reuters](#)) Bila kapasitas kelembagaan belum matang, ekspansi mandat yang terlalu cepat dapat menciptakan risiko operasional.

7. Danantara, BUMN, dan Reformasi Tata Kelola

Salah satu tantangan terbesar BUMN di Indonesia adalah peran ganda. BUMN dituntut mencari laba, tetapi juga menjalankan misi publik. BUMN harus bersaing, tetapi sering mendapat penugasan. BUMN harus profesional, tetapi kerap berada dalam orbit politik. BUMN harus membayar dividen, tetapi juga diminta membiayai proyek strategis. Ketegangan ini tidak mudah diselesaikan.

OECD menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi legal dan institusional untuk memperkuat tata kelola BUMN dan memasukkan pertimbangan keberlanjutan, tetapi masih terdapat tantangan penting dalam pengarusutamaan kebijakan keberlanjutan ke dalam fungsi kepemilikan negara. ([OECD](#)) Ini relevan dengan Danantara karena Danantara menjadi pusat baru fungsi kepemilikan negara.

Dalam praktik terbaik internasional, fungsi kepemilikan negara seharusnya dipisahkan dari fungsi regulasi. Pemerintah sebagai pemilik tidak boleh mencampuradukkan kepentingan regulasi dengan kepentingan perusahaan. Bila kementerian teknis mengatur sektor sekaligus mengendalikan perusahaan di sektor tersebut, konflik kepentingan mudah muncul. Danantara dapat memperbaiki masalah ini bila ia bertindak sebagai pemilik profesional, sementara regulasi tetap dilakukan oleh kementerian dan otoritas independen.

Namun, Danantara juga dapat memperburuk masalah bila ia menjadi pusat kekuasaan ekonomi yang terlalu besar tanpa pengawasan memadai.

Karena itu, struktur Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, komite investasi, komite risiko, audit internal, pelaporan publik, dan pengawasan legislatif menjadi sangat penting.

Reformasi tata kelola Danantara harus mencakup beberapa hal. Pertama, transparansi portofolio. Publik perlu mengetahui aset apa yang dikelola, nilai aset, sumber pendanaan, komposisi portofolio, dan kinerja investasi. Kedua, standar pemilihan proyek. Setiap proyek perlu melalui analisis kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan risiko fiskal. Ketiga, pengungkapan konflik kepentingan. Semua pejabat dan pengambil keputusan harus tunduk pada aturan konflik kepentingan yang ketat. Keempat, audit berkala. Audit tidak cukup bersifat internal; perlu audit eksternal yang kredibel. Kelima, evaluasi dampak pembangunan. Danantara tidak hanya dinilai dari laba, tetapi juga dari nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan dampak keberlanjutan.

8. Danantara dan Hilirisasi: Antara Transformasi dan Rente

Hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pembangunan Indonesia. Negara ingin agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dalam logika ini, nikel tidak cukup diekspor sebagai bijih; ia harus menjadi bahan baterai. Bauksit tidak cukup menjadi bahan mentah; ia harus menjadi alumina dan aluminium. Sawit tidak cukup menjadi CPO; ia harus masuk ke pangan olahan, oleokimia, energi, dan biomaterial. Gas dan batu bara tidak hanya menjadi komoditas ekspor; keduanya harus dikaitkan dengan industri petrokimia dan energi domestik.

Danantara dapat memainkan peran penting dalam hilirisasi karena hilirisasi membutuhkan modal besar, koordinasi lintas sektor, infrastruktur, teknologi, dan kepastian jangka panjang. Pasar sering enggan membiayai tahap awal hilirisasi karena risikonya besar. Di sinilah negara dapat hadir sebagai risk taker strategis.

Namun, hilirisasi juga rawan rente. Jika proyek hilirisasi hanya diberikan kepada kelompok tertentu tanpa kompetisi transparan, maka nilai tambah nasional dapat berubah menjadi keuntungan segelintir elite. Jika insentif fiskal diberikan tanpa indikator kinerja jelas, maka negara kehilangan penerimaan tanpa memperoleh manfaat industri. Jika dampak lingkungan diabaikan, maka hilirisasi dapat menciptakan kerusakan ekologis yang mahal.

Karena itu, Danantara harus memastikan bahwa hilirisasi bukan sekadar pemindahan rente dari ekspor bahan mentah ke industri pengolahan. Hilirisasi harus menghasilkan learning, teknologi, keterampilan, produktivitas, ekspor bernilai tinggi, dan penguatan rantai pasok domestik. Tanpa itu, hilirisasi hanya menjadi industrialisasi semu.

9. Danantara, Investor Global, dan Kredibilitas Negara

Dalam ekonomi global, modal bergerak berdasarkan ekspektasi risiko dan kepercayaan. Danantara dapat menjadi pintu masuk investor global ke proyek strategis Indonesia. Namun, investor tidak hanya melihat potensi pasar. Mereka juga melihat aturan main, stabilitas kebijakan, tata kelola, kepastian hukum, transparansi, dan kemampuan eksekusi.

Reuters melaporkan bahwa pada peluncurannya, Presiden Prabowo menjanjikan transparansi dan menyatakan bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja karena dimiliki rakyat. ([Reuters](#)) Pernyataan ini penting karena reputasi Danantara akan sangat ditentukan oleh apakah janji transparansi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan.

Kredibilitas Danantara juga menentukan biaya modal. Bila investor percaya bahwa Danantara dikelola profesional, maka pembiayaan dapat diperoleh lebih murah. Bila investor melihat risiko politik tinggi, maka biaya modal meningkat. Bila laporan keuangan tidak jelas, investor meminta premi risiko. Bila keputusan investasi tidak transparan, investor akan berhati-hati.

Dalam konteks global, Danantara juga harus berhati-hati terhadap persepsi geopolitik. Sovereign wealth fund sering dipandang bukan hanya sebagai investor, tetapi juga sebagai instrumen negara. Karena itu, investasi Danantara di luar negeri atau kemitraan dengan negara lain dapat dibaca dalam kacamata geopolitik. Sebaliknya, investasi asing ke proyek Danantara juga dapat membawa kepentingan strategis negara asal investor. Ini memerlukan diplomasi ekonomi yang matang.

10. Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara dapat menjadi pembanding.

Singapura memiliki Temasek dan GIC. Temasek mengelola portofolio perusahaan dan investasi dengan disiplin korporasi, sementara GIC mengelola cadangan negara secara global. Kunci keberhasilan Singapura bukan hanya besarnya aset, tetapi kualitas tata kelola, profesionalisme, disiplin risiko, dan pemisahan relatif antara keputusan investasi dan politik harian.

Norwegia memiliki Government Pension Fund Global yang sering dianggap sebagai standar tinggi transparansi sovereign wealth fund. Dana ini memiliki aturan investasi, etika, pelaporan, dan pengawasan publik yang kuat. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dana negara dapat dikelola untuk kepentingan antargenerasi, bukan hanya kebutuhan politik jangka pendek.

Cina menggunakan BUMN, bank pembangunan, dan dana negara sebagai instrumen industrialisasi. Model Cina menunjukkan bahwa kapitalisme negara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga menimbulkan risiko overinvestment, utang, dan distorsi pasar bila disiplin investasi melemah.

Malaysia memberikan pelajaran berbeda melalui pengalaman 1MDB. Kasus 1MDB menunjukkan bahwa dana negara tanpa tata kelola kuat dapat

berubah menjadi skandal besar. Pelajaran utamanya adalah bahwa ukuran aset tidak menjamin keberhasilan; transparansi, audit, integritas, dan pengawasan politik justru menjadi fondasi utama.

Indonesia harus mengambil pelajaran selektif. Dari Singapura, Indonesia dapat belajar tentang profesionalisme dan pemisahan mandat. Dari Norwegia, Indonesia dapat belajar tentang transparansi dan orientasi antargenerasi. Dari Cina, Indonesia dapat belajar tentang kebijakan industri dan koordinasi negara. Dari Malaysia, Indonesia harus belajar tentang bahaya moral hazard dan korupsi dalam badan investasi negara.

11. Danantara dan Masa Depan Demokrasi Ekonomi

Danantara bukan hanya isu ekonomi. Ia juga isu demokrasi. Aset yang dikelola Danantara pada dasarnya adalah kekayaan publik. BUMN dimiliki negara, dan negara secara moral-politik mewakili rakyat. Karena itu, pengelolaan aset BUMN tidak boleh menjadi urusan teknokratis yang tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana kekayaan negara dikelola.

Demokrasi ekonomi berarti rakyat tidak hanya menjadi penonton dari keputusan elite ekonomi. Demokrasi ekonomi menuntut transparansi, akuntabilitas, distribusi manfaat, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Jika Danantara berhasil menciptakan nilai tetapi manfaatnya hanya terkonsentrasi pada korporasi besar, maka legitimasi sosialnya akan lemah. Jika Danantara membiayai proyek besar tetapi tidak menciptakan pekerjaan bermutu, transfer teknologi, dan pemerataan wilayah, maka ia dapat dikritik sebagai kapitalisme negara yang elitis.

Sebaliknya, jika Danantara mampu mengubah aset negara menjadi investasi produktif, menciptakan industri baru, memperkuat UMKM dalam rantai pasok, membuka lapangan kerja berkualitas, mendukung energi bersih, memperkuat pangan, dan meningkatkan penerimaan negara, maka ia dapat menjadi instrumen demokrasi ekonomi yang nyata.

Kuncinya adalah distribusi nilai. Danantara harus menjawab pertanyaan: nilai yang diciptakan untuk siapa? Untuk neraca lembaga? Untuk BUMN? Untuk investor? Untuk negara? Untuk rakyat? Jawaban idealnya adalah semua, tetapi prioritas moralnya harus jelas: kekayaan publik harus menghasilkan manfaat publik.

12. Kerangka Analitis: Tiga Skenario Danantara

Masa depan Danantara dapat dibaca melalui tiga skenario.

Skenario 1: Danantara sebagai Mesin Transformasi Produktif

Dalam skenario optimistis, Danantara menjadi lembaga profesional yang mampu mengelola aset BUMN secara efisien, menarik investor global, membiayai proyek strategis, memperkuat hilirisasi, dan memperbaiki tata kelola BUMN. Laporan keuangan diterbitkan tepat waktu. Proyek dipilih berdasarkan kelayakan. Risiko fiskal dilaporkan transparan. Intervensi politik dibatasi. Danantara menjadi katalis produktivitas nasional.

Skenario ini akan memperkuat kepercayaan investor, memperbaiki kinerja BUMN, meningkatkan nilai tambah industri, dan membantu Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan 5%. Dalam skenario ini, kapitalisme negara menjadi developmental capitalism: negara aktif, tetapi disiplin.

Skenario 2: Danantara sebagai Holding Besar yang Bekerja Campuran

Dalam skenario moderat, Danantara mencatat beberapa keberhasilan, tetapi juga menghadapi masalah koordinasi, kapasitas, dan konflik mandat. Sebagian proyek berhasil, sebagian tertunda. Transparansi membaik, tetapi belum optimal. BUMN tertentu menjadi lebih efisien, tetapi BUMN lain tetap menjadi beban. Investor global tertarik, tetapi tetap meminta premi risiko.

Ini adalah skenario paling realistis bila reformasi berjalan bertahap. Danantara menjadi instrumen penting, tetapi belum sepenuhnya menjadi

mesin transformasi. Kapitalisme negara dalam skenario ini bersifat campuran: sebagian produktif, sebagian birokratis.

Skenario 3: Danantara sebagai Instrumen Politisasi Ekonomi

Dalam skenario pesimistis, Danantara terlalu banyak diberi tugas politik, proyek dipilih tanpa kelayakan memadai, utang meningkat, laporan keuangan terlambat atau tidak jelas, dan BUMN digunakan untuk menutup beban kebijakan publik. Kepercayaan investor melemah. Risiko fiskal terselubung meningkat. Danantara menjadi simbol konsentrasi kekuasaan ekonomi negara yang tidak cukup akuntabel.

Skenario ini berbahaya karena dapat merusak bukan hanya Danantara, tetapi juga kredibilitas ekonomi Indonesia. Dalam skenario ini, kapitalisme negara berubah menjadi patronage capitalism: negara aktif, tetapi tidak disiplin.

13. Rekomendasi Kebijakan

Agar Danantara menjadi instrumen transformasi, beberapa rekomendasi penting perlu diperhatikan.

Pertama, **perjelas mandat kelembagaan**. Danantara perlu memisahkan fungsi komersial, strategis, pembangunan, dan pelayanan publik. Setiap fungsi harus memiliki indikator kinerja berbeda.

Kedua, **terbitkan laporan keuangan dan laporan portofolio secara berkala**. Transparansi harus menjadi identitas Danantara. Laporan harus mencakup nilai aset, kinerja investasi, utang, risiko, proyek strategis, konflik kepentingan, dan dampak pembangunan.

Ketiga, **bangun komite investasi independen**. Keputusan investasi harus melalui proses profesional, bukan semata instruksi politik. Komite ini perlu terdiri dari ahli investasi, industri, risiko, hukum, ESG, dan pembangunan.

Keempat, **batasi quasi-fiscal risk**. Jika Danantara menjalankan penugasan publik, kompensasinya harus jelas. Jangan biarkan misi sosial disembunyikan sebagai investasi komersial.

Kelima, **terapkan prinsip Santiago Principles**. Prinsip tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan praktik investasi hati-hati perlu menjadi rujukan. IFSWF menempatkan prinsip-prinsip ini sebagai kerangka penting bagi sovereign wealth fund. ([IFSWF](#))

Keenam, **perkuat pengawasan legislatif dan publik**. DPR, BPK, OJK, auditor independen, akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu memiliki akses informasi yang memadai untuk mengevaluasi Danantara.

Ketujuh, **jaga kompetisi pasar**. Danantara tidak boleh menjadi alat untuk memonopoli sektor produktif. Ia harus mendorong investasi swasta, bukan menggantikannya.

Kedelapan, **ukur dampak pembangunan**. Selain return on investment, Danantara perlu mengukur return on development: lapangan kerja, nilai tambah domestik, transfer teknologi, pengurangan emisi, ketahanan pangan, dan pemerataan wilayah.

Kesembilan, **bangun kapasitas SDM kelas dunia**. Mengelola aset strategis memerlukan talenta terbaik dalam investasi, hukum, teknologi, energi, komoditas, keuangan, dan manajemen risiko.

Kesepuluh, **jaga independensi dari politik jangka pendek**. Negara boleh menentukan arah strategis, tetapi keputusan investasi harian harus profesional.

14. Kesimpulan

Danantara adalah salah satu eksperimen kelembagaan paling penting dalam ekonomi politik Indonesia kontemporer. Ia lahir dari kebutuhan nyata: memperbaiki pengelolaan BUMN, mempercepat investasi, mendorong hilirisasi, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan mencari jalan

keluar dari pertumbuhan yang stabil tetapi belum cukup tinggi. Dalam arti ini, Danantara adalah jawaban terhadap keterbatasan model pembangunan lama.

Namun, Danantara juga merupakan ujian besar bagi kualitas negara Indonesia. Kapitalisme negara hanya akan berhasil bila negara memiliki kapasitas, integritas, disiplin, dan akuntabilitas. Negara yang aktif tetapi tidak transparan dapat menciptakan distorsi. Negara yang kuat tetapi tidak akuntabel dapat menciptakan rente. Negara yang ambisius tetapi tidak disiplin dapat menciptakan risiko fiskal.

Karena itu, masa depan Danantara tidak ditentukan oleh besarnya aset semata. Masa depan Danantara ditentukan oleh tata kelola. Jika Danantara mampu menjadi lembaga profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi nilai jangka panjang, ia dapat menjadi mesin transformasi ekonomi Indonesia. Jika tidak, ia dapat menjadi bentuk baru kapitalisme negara yang memperbesar konsentrasi kekuasaan ekonomi tanpa cukup manfaat publik.

Arah baru kapitalisme negara di Indonesia seharusnya bukan kembali ke etatisme lama, di mana negara mengendalikan terlalu banyak hal tanpa disiplin pasar. Arah baru yang ideal adalah **negara strategis**: negara yang mampu mengarahkan, mengonsolidasikan, membiayai, dan mempercepat transformasi, tetapi tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas publik, rasionalitas ekonomi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Danantara, dengan demikian, adalah peluang sejarah. Ia dapat menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Tetapi peluang itu hanya akan menjadi kenyataan bila kekayaan negara dikelola bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai amanah publik.

Aset BUMN

Kekayaan ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh badan usaha milik negara, baik berupa saham, infrastruktur, kas, anak perusahaan, hak usaha, maupun aset produktif lain.

Badan Pengelola Investasi

Lembaga yang diberi mandat untuk mengelola investasi negara atau aset publik dengan tujuan tertentu, baik komersial maupun pembangunan.

BUMN

Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara.

Crowding in

Keadaan ketika investasi negara mendorong masuknya investasi swasta, misalnya dengan mengurangi risiko awal atau membangun infrastruktur pendukung.

Crowding out

Keadaan ketika investasi atau dominasi negara justru menggantikan, menekan, atau mengurangi ruang investasi swasta.

Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lembaga investasi strategis Indonesia yang memiliki mandat mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN serta investasi pemerintah.

Developmental state

Model negara pembangunan di mana pemerintah secara aktif mengarahkan industrialisasi, investasi, dan transformasi ekonomi.

Dividen BUMN

Bagian laba BUMN yang disetorkan kepada negara sebagai pemegang saham.

ESG

Environmental, Social, and Governance; kerangka penilaian investasi dan korporasi berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Hilirisasi

Proses meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri sebelum dipasarkan atau diekspor.

Kapitalisme negara

Model ekonomi di mana negara berperan besar sebagai pemilik, investor, pengarah, atau pengendali aktivitas ekonomi, tetapi mekanisme pasar tetap berjalan.

Mandat komersial

Tugas lembaga untuk menghasilkan keuntungan finansial berdasarkan prinsip bisnis.

Mandat pembangunan

Tugas lembaga untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang, meskipun tidak selalu memberikan keuntungan finansial langsung.

Moral hazard

Keadaan ketika pihak tertentu mengambil risiko berlebihan karena merasa akan diselamatkan atau ditanggung pihak lain.

Patronage capitalism

Bentuk kapitalisme di mana akses ekonomi ditentukan oleh kedekatan politik, jaringan patronase, atau relasi kekuasaan.

Quasi-fiscal activity

Kegiatan yang berdampak seperti belanja atau subsidi negara, tetapi dilakukan melalui lembaga di luar APBN, misalnya BUMN atau badan investasi negara.

Sovereign wealth fund

Dana investasi milik negara yang biasanya digunakan untuk mengelola

kekayaan nasional, surplus fiskal, cadangan devisa, atau pendapatan komoditas.

Super-holding

Struktur induk besar yang mengendalikan dan mengelola berbagai perusahaan atau BUMN sebagai portofolio terpadu.

Tata kelola

Sistem aturan, proses, nilai, pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas yang menentukan bagaimana lembaga dikelola.

Daftar Pustaka Akademik

Bernstein, S., Lerner, J., & Schoar, A. (2013). The investment strategies of sovereign wealth funds. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 219–238. DOI: 10.1257/jep.27.2.219

Calluzzo, P., Nathan Dong, G., & Godsell, D. (2017). Sovereign wealth fund investments and the US political process. *Journal of International Business Studies*, 48(2), 222–243. DOI: 10.1057/s41267-016-0057-5

Cuervo-Cazurra, A., Inkpen, A., Musacchio, A., & Ramaswamy, K. (2014). Governments as owners: State-owned multinational companies. *Journal of International Business Studies*, 45(8), 919–942. DOI: 10.1057/jibs.2014.43

Dixon, A. D., & Monk, A. H. B. (2017). A simple typology of sovereign development funds. In M. Rietveld & P. Toledano (Eds.), *The new frontiers of sovereign investment* (pp. 83–100). Columbia University Press. DOI: 10.7312/riet17750-008

Johan, S. A., Knill, A., & Mauck, N. (2013). Determinants of sovereign wealth fund investment in private equity vs public equity. *Journal of International Business Studies*, 44(2), 155–172. DOI: 10.1057/jibs.2012.39

Kim, K. (2022). Locating new “state capitalism” in advanced economies. *New Political Economy*, 27(5), 837–856. DOI: 10.1080/13569775.2021.2022335

Montambault Trudelle, A. (2024). Tools of regime stability: The political economy of sovereign wealth funds in Gulf rentier states. *Review of International Political Economy*, 31(5), 1446–1471. DOI: 10.1080/09692290.2024.2325394

Musacchio, A., Lazzarini, S. G., & Aguilera, R. V. (2015). New varieties of state capitalism: Strategic and governance implications. *Academy of Management Perspectives*, 29(1), 115–131. DOI: 10.5465/amp.2013.0094

OECD. (2026). *State ownership and sustainability in Indonesia*. OECD Business and Finance Policy Papers, No. 98. DOI: 10.1787/130a7188-en

Wright, M., Wood, G., Musacchio, A., Okhmatovskiy, I., Grosman, A., & Doh, J. P. (2021). State capitalism in international context: Varieties and variations. *Journal of World Business*, 56(2), 101160. DOI: 10.1016/j.jwb.2020.101160

Xu, Y.-C. (2010). The political economy of sovereign wealth funds. In Y.-C. Xu & G. Bahgat (Eds.), *The political economy of sovereign wealth funds*. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9780230290648_1

Sumber Kebijakan dan Data Terkini

Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Badan Pemeriksa Keuangan. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Danantara Indonesia. (2026). *Tentang Danantara Indonesia*. ([Danantara Indonesia](#))

International Forum of Sovereign Wealth Funds. (2026). *Santiago Principles and sovereign wealth fund governance*. ([IFSWF](#))

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation*. ([IMF eLibrary](#))

OECD. (2026). *Indonesia: OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1*. ([OECD](#))

Reuters. (2025). *New Indonesia sovereign wealth fund to invest USD 20 billion in projects*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026). *Indonesia's Prabowo taps Danantara to drive agenda, testing fund's capacity*. ([Reuters](#))

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 22 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>